

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), dimana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi syarat dan kewajibannya. Bantuan tunai diberikan selama 6 tahun dan maksimal 9 tahun.

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin, yang memiliki ibu hamil, nifas, atau menyusui; atau anak balita dan prasekolah; atau memiliki anak yang masih bersekolah di tingkat SD atau SMP sederajat; anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Kewajiban keluarga PKH adalah menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil.

Dalam jangka panjang, PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan ini dapat tercapai melalui peningkatan sumber daya manusia, dan perubahan perilaku Peserta PKH untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.





TUJUAN

Mengubah perilaku, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi.

KRITERIA PESERTA

Peserta merupakan Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan data yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT), yang memenuhi sedikitnya satu dari kriteria berikut:

- Ibu hamil, nifas, atau menyusui.
- Anak bawah 5 tahun (balita) atau prasekolah.
- Anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD, MI, Paket A, atau SDLB.
- Anak usia 15-18 tahun yang bersekolah di SMP, MTs, Paket B, SMLB.
- Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas.

KEWAJIBAN PESERTA

- Memeriksa anggota keluarganya (ibu hamil, nifas, atau menyusui, dan balita) secara berkala sesuai ketentuan ke fasilitas kesehatan (posyandu, puskesmas, dll).
- Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran 85%.

BESARAN BANTUAN

Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk setiap keluarga Peserta PKH diberikan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Sejak pertengahan 2013, besaran bantuan tunai tersebut disesuaikan dengan perkembangan daya beli sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan Periode Tahun 2014
Bantuan tetap	Rp 300.000
Ibu hamil, nifas, atau menyusui, atau anak bawah 5 tahun (balita), atau anak usia prasekolah (APraS)	Rp 1.000.000
Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp 500.000
Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp 1.000.000
Bantuan minimum per keluarga	Rp 800.000
Bantuan maksimum per keluarga	Rp 2.800.000

PKH MERUPAKAN PROGRAM NASIONAL YANG M



UNIT PENGELOLA
PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (UPPKH)



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PELAKSANAAN PKH



MELIBATKAN LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Fasilitas pendidikan, kesehatan,
rumah singgah (*supply side*)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | KEMENTERIAN AGAMA

- Menyediakan fasilitas pendidikan (fasdik).
- Menyediakan daftar hadir.
- Mengisi formulir P1 dan melakukan verifikasi.
- Mengembalikan formulir yang sudah diverifikasi ke Pendamping PKH.
- Menempatkan pekerja anak dan anak jalanan yang sudah di rumah singgah ke satuan pendidikan.



Komplementaritas program: menyediakan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), dan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi seluruh anak usia sekolah dari keluarga Peserta PKH.



KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menyediakan fasilitas kesehatan (faskes).
- Menyediakan daftar kunjungan: Buku KIA.
- Mengisi formulir K dan melakukan verifikasi formulir.
- Mengembalikan formulir yang sudah diverifikasi ke Pendamping PKH.

Komplementaritas program: memastikan seluruh anggota keluarga Peserta PKH terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | KEMENTERIAN SOSIAL

- Menarik Peserta PKH yang menjadi pekerja anak/anak jalanan.
- Rekapitulasi data pekerja anak/anak jalanan hasil validasi.
- Menempatkan pekerja anak/anak jalanan di rumah singgah.
- Memberi pendampingan dan tutorial pekerja anak/anak jalanan di rumah singgah.
- Melakukan verifikasi kehadiran anak di rumah singgah.
- Mengembalikan formulir P1 yang sudah diverifikasi ke Pendamping PKH.
- Menyerahkan anak yang sudah dibina di rumah singgah kembali ke satuan pendidikan.
- Memantau keberlanjutan pendidikan anak tersebut.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Memfasilitasi pembuatan kartu identitas penduduk (KTP dan kartu keluarga).
- Memastikan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKH.
- Meningkatkan koordinasi antar dinas terkait pelaksanaan PKH.
- Mengelola pengaduan melalui TKPK provinsi dan kabupaten/kota.

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM



Karena mencakup Keluarga Sangat Miskin, maka anggota keluarga penerima PKH secara otomatis adalah juga Penerima Bantuan Iuran/Kartu Indonesia Sehat (KIS), Raskin, dan Program Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP), atau dikenal dengan Komplementaritas Program.

Sebelumnya hanya **30%** keluarga miskin yang menerima keseluruhan program. Komplementaritas ini memastikan perlindungan sosial yang sifatnya terpadu.



JUMLAH PESERTA

Perkembangan jumlah peserta dan lokasi PKH sejak tahun 2007.

	2011	2012	2013	2014
Keluarga sasaran (juta)	1,1	1,5	2,4	3,0
Provinsi	25	33	34	34
Kabupaten/kota	103	166	336	418
Kebutuhan dana (Rp triliun)	1,6	1,8	3,2	3,8

2007	2013
500.000 PESERTA	2.400.000 PESERTA
7 provinsi	34 provinsi
48 kab/kota	336 kab/kota
337 kecamatan	3.429 kecamatan

2014

2,7 juta peserta
34 provinsi
430 kabupaten/kota
4.871 kecamatan

Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan pendampingan, verifikasi, dan layanan kepada **7,2 juta orang**.



3 juta
keluarga



100 ribu
ibu hamil



3 juta
anak usia SD



1,1 juta
anak usia SMP

PERIODE KEPESERTAAN

Pada awalnya periode kepesertaan ditetapkan selama 6 tahun. Namun, setelah 6 tahun berjalan tingkat kesejahteraan keluarga belum tentu mengalami peningkatan. Maka, dikembangkan metodologi evaluasi (resertifikasi) untuk menilai apakah keluarga tersebut masih layak mendapatkan PKH bagi yang dinilai kesejahteraan keluarganya lebih baik (tidak miskin), mereka tidak lagi mendapatkan bantuan PKH, meskipun tetap dapat menerima program perlindungan sosial lainnya. Bagi mereka yang tingkat kesejahteraannya masih miskin akan tetap menerima bantuan PKH selama 3 tahun.

Keluarga akan berhenti secara alamiah dari kepesertaan PKH bila tidak lagi memenuhi salah satu dari kriteria: terdapat ibu hamil, nifas, menyusui, anak balita, anak prasekolah, atau anak berumur di bawah 18 tahun yang masih bersekolah di bangku pendidikan dasar (SD dan SMP).

Chile: <i>Solidario</i>	Meksiko: <i>Progres-Oportunidades</i>	Nicaragua: <i>Red de Proteccion Social (RPS)</i>	Honduras: <i>Programa de Asignacion Familiar (PRAF)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Diberikan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dan masih memenuhi persyaratan kepesertaan, diberikan transfer dasar dan jaminan akses ke berbagai subsidi dan program sosial lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan sertifikasi setelah 3 tahun. Jika peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan, dipertahankan hingga 4 tahun (perkotaan) dan 6 tahun (pedesaan). Setelah periode ini, dialihkan ke EDA (<i>Differential Support Scheme</i>) selama 3 tahun (jika terus memenuhi syarat kepesertaan). 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dibayarkan bagi rumah tangga selama 3 tahun. Setelah periode ini, mereka dapat menerima layanan selama 2 tahun tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Durasi kepesertaan ditentukan atas ketersediaan anggaran.

Program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) merupakan program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan di berbagai negara di kawasan Amerika Latin, seperti: *Brasil, Chile, Kolombia, Honduras, Nikaragua*; di Amerika Tengah seperti: *Guatemala, Meksiko, Panama, Jamaika*; dan di beberapa negara Asia, seperti: *Filipina, Mesir, Turki*.

Di negara-negara tersebut, program ini terbukti dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin.



Sosialisme ala Lula

Oleh BUDIMAN SUDJATMIKO

Saat saya menemui Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di kantor barunya, Instituto da Cidadania atau Institut Warga Negara, di Sao Paulo, 23 Mei petang lalu, karismanya terpancar dari keberahajannya.

Saat itu Lula didampingi Luiz Duki, mantan Menko Ekonomi Politik, dan Sekjen Partai Pekerja Luiz Inácio da Silva (Lula) adalah presiden yang prestasi-pestaannya selama memimpin Brasil diakui oleh lawan-lawan politiknya dan dunia. Sebagai tokoh Sosial, dia dihormati oleh aktivis-aktivis gerakan sosial dalam Forum Sosial Dunia dan di berbagai pejabat dalam Forum Ekonomi Dunia.

Mematahkan mitos

Dalam diskusi selama sekitar 1,5 jam, Lula dan Luiz menjelaskan bahwa apa yang coba diraih oleh Lula selama dua periode pemerintahannya adalah melakukan transformasi sosialis secara progresif dan tidak dogmatis. Itu adalah arah pembangunan nasional yang baru bagi Brasil. Marhan pemimpin buruh ini mencoba mematahkan mitos-mitos neoliberalisme yang selama ini dipegang oleh Pemerintah Brasil sebelumnya.

Dengan ide-ide yang sudah dicetus, Lula dan Luiz menjelaskan sejumlah mitos neoliberal. Di antara mitos-mitos tersebut adalah bahwa pemerintah harus mendorong lebih banyak ekspor karena masih bersandar pada daya beli masyarakat Brasil (pasar domestik) yang rendah. Urutik mematahkan mitos tersebut, Lula mencoba mengembarkan ekspor sekaligus membangkitkan pasar domestik.

Hai ini dilakukan Lula dengan mendorong bank-bank milik negara memberi lebih banyak kredit bagi perusahaan pertanian besar dengan bunga rendah, 5 persen per tahun, dengan sanksi yang tegas jika tidak melaksanakannya. Hasilnya adalah mereka jadi lebih produktif dan kom-



mentasikan perkembangan Brasil. Beberapa BUMN strategis, seperti Petrobras (minyak) atau Barik Brasil, dimasukkan ke bursa efek; 49 persen sahamnya diperdagangkan dan 51 persen tetap dikuasai pemerintah. Ini telah memungkinkannya. Burea Etik Brasil (Owens) menjadi reformasi penting di Amerika Latin.

Ada juga mitos lain seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan sebelumnya. Mitosnya adalah bahwa perkembangan Brasil tidak boleh bertumbuh lebih dari 7 persen agar inflasi bisa dikendalikan.

Luiz Duki selaku mantan Menko Ekonomi Politik pada era Lula menjelaskan bahwa Lula berhasil memacu pertumbuhan 4 persen sampai dengan 5 persen per tahun—bahkan pada tahun 2010 bisa mencapai 7 persen—dengan angka inflasi yang tercatat terendah dalam sejarah Brasil: 4 persen. Padahal, saat Lula baru mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya pada 2002, dia diwarisi inflasi hingga 16 persen.

Tentu tak semuanya kisah tentang sukses. Lula mengakui bahwa ada satu kegagalan yang sangat strategis selama dua periode pemerintahannya. Kegagalan yang dia maksud adalah saat mengajukan BULU Pajak Progresif. BULU ini mengizinkan masyarakat kelas atas membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi atas pendapatannya. Kegagalan ini disebabkan Partai Pekerja dan Partai Sosialis yang mendukungnya di parlemen hanya mengosong 30 persen kursi sehingga kalah voting.

Sementara BULU ini kalah, diharapkan Brasil memiliki sumber pendapatan bagi lebih banyak proyek sosial untuk rakyat miskin, melalui mayoritas saham perusahaan-perusahaan asing, dan juga melalui labu-tanah perkebunan luas milik swasta un-

tuk didistribusikan kepada petani miskin.

Bantuan tunai

Meski BULU Pajak Progresif tersebut tidak lolos, rakyat miskin tetap bisa ditolong saat Lula menggenjot program bantuan langsung tunai sebagai bagian dari Program Jelas Futura. Dalam program ini setiap keluarga miskin diberi kartu ATM untuk mengambil uang tunai tersebut sehingga transaksiya tercatat secara elektronik.

Sistem ini diharapkan bisa menegak pengalangan politik atau kecacatan distribusi. Namun, agar program bantuan langsung tunai itu menjadi efektif, bisa menyerap kewajutuan rakyat, keluarga penerima bantuan langsung tunai diwajibkan menyekolahkan anak-anaknya dan rajin memeriksa kesehatan mereka di pusat-pusat kesehatan masyarakat. Keluarga-cuma-cuma. Jika gagal memenuhi syarat ini, keluarga tersebut akan dikecualikan dari program bantuan langsung tunai.

Lula (yang harus meninggalkan diskusi lebih dulu karena melawat waktu yang dijadwalkan) berucap kepada saya dengan bergairah. Dari penuturannya, saya menangkap kerinduan Lula pada negerinya dan dia yang lebih baik.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, guru yang seperti saya bagi penggiat politik muda seperti saya adalah semangatnya yang sudah menginspirasi-gugah-jawaban tugas-tugas mulia. Lula sekarang banyak menghabiskan waktu berkeliling Brasil dan dunia untuk berceramah.

Sebelum pada akhir pekan dia memotong sekap bola Liga Brasil dengan berputar-putar di tribuna kelas ekonomi bersama rakyat biasa yang ia cintai. Sebelum kami berpisah, Lula menyampaikan salam hangat untuk semua pemburu sosial di Indonesia. *Malto prazer em conhecer a Presidente Lula*.

BUDIMAN SUDJATMIKO
Anggota F-PDP DPR
Pembina Paralel Nusantara
(Persewaan Rakyat Duta Nusantara)

Negara	Nama Program CCT	Negara	Nama Program CCT
Indonesia	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meksiko	Oportunidades
Brasil	Bolsa Familia, Bolsa Escola	Guatemala	Mi Familia Progresiva
Chile	Chile Solidario	Nicaragua	Social Protection Network
Kolombia	Familias en Acción	Panama	Red de Oportunidades
Honduras	The Family Allowance Program (PRAF II)	Filipina	Pantawid Pamilyang Pilipino Program
Jamaika	Programme of Advancement Through Health and Education (PATH)	Turki	Şartlı Nakit Transferi
		Mesir	Program Minhet El-Osra

INFO LEBIH LANJUT:

Kantor UPPKH Pusat

Gedung D Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telp: (021) 3103591 ext. 2446
Fax: (021) 3147474/3925153
Website: www.pkh.depsos.go.id

Sekretariat TNP2K

Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3912812
Fax: (021) 3912511
E-mail: info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id